

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sebelum terjadinya revolusi Iran tahun 1979, Iran merupakan Negara yang dihimpit oleh dua kekuatan raksasa (super power), yaitu Rusia dan Inggris, bahkan Iran menjadi Negara yang berdaulat semu yang kemudian dibagi menjadi dua wilayah pengaruh masing-masing dibawah Rusia dan Inggris. Pada masa Pemerintahan Dinasti Qajar (1794-1925), Negara Iran kehilangan kedaulatannya, walaupun secara formal Iran merupakan sebuah Negara yang merdeka. Dengan luas wilayah sekitar 1.648.195 Km serta dikelilingi oleh Negara-negara sekitar Asia dan Eropa, seperti Turki, Rusia, Afganistan, Pakistan, dan Irak menjadikan Iran berada disuatu lokasi yang strategis.¹ Batas-batas Negara Iran terdiri dari 5.170 Km dari batas daratan dan 2.150 Km dari batas air. Secara etnis, Negara Iran terdapat berbagai macam suku bangsa dan bahasa, seperti didaratan rendah orang berbicara Persia, Bahtiyari, Luri dan Armenia. Suku Kurdi berbahasa Kurdi, penduduk Azerbaizan berbahasa Azeri, sedangkan dibeberapa tempat ada yang berbahasa Arab. Di Iran terdapat bangsa Persia, Baluchi, Arab, Afgan, Afsar, Kurdish, Nolushirvani,, Azeri, Turki, Sansaven, Tamshid, Tajik, Qajar dan lain-lain.

¹ Suryandono, *Sriah dan Gejala Demokratisasi* Diktat MDI Universitas Muhammadiyah

Setelah runtuhnya Dinasti Qajar dengan adanya suatu kudeta dari Reza Khan yang kemudian disusul berdirinya Dinasti Pahlevi, yang dipimpin oleh Reza Khan. Namun kekuasaan Reza Khan yang otoriter itu tidak bertahan lama(1925-1941), karena ia bersimpati pada Jerman dalam perang Dunia kedua, yang pada akhirnya ia dipaksa untuk turun dari jabatannya sebagai Syah (raja), oleh pasukan Inggris dan Rusia, yang kemudian digantikan oleh putra mahkotanya yaitu, Mohammad Reza Pahlevi (Syah Iran) pada tahun 1941-1978). Pada awal kepemimpinan Syah Iran menggunakan Sistem Monarkhi Konstitusional, akan tetapi setelah pada tahun 1953 Iran menjadi Pemerintahan yang Monarkhi Absolut, dengan banyaknya permasalahan-permasalahan dalam berbagai macam bidang seperti sosial, ekonomi dan politik, menjadikan Syah Iran banyak melakukan pelanggaran Konstitusional, otokratik, diktator yang melebihi ayahnya (Reza Khan). Pada masa inilah pengaruh Amerika Serikat masuk kedalam berbagai dimensi kehidupan Pemerintahan Iran.² Pada masa Pemerintahan Syah Iran dapat dibagi dalam dua periode. Yaitu, periode pertama 1941-1962, dimana Syah berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, hal ini menyebabkan Iran terintegrasi dalam sistem militer dan politik Barat, khususnya Amerika Serikat. Sampai akhirnya kekuasaan didominasi oleh kelompok-kelompok kelas. Kekuasaan Syah sangat bergantung pada kalangan elit militer, kelas pemilik tanah dan kelas atas. Periode kedua 1963-1978, pada periode ini Syah berhasil mengkonsolidasikan

² M. Amin Rais dalam Syaifuddin, *Kemajuan Bangsa-Bangsa Islam*, Jember: Pustaka Islam, 2001, hal. 100

kekuasaannya, sehingga terjadi kolusi antara kalangan Istana dengan kalangan borjuis (industrialis). Menurut James Bill, Syah berupaya memberikan pemaksaan dan penekanan serta ia tidak mau menerima perbedaan atau oposisi politik.³ pada masa ini mulai terlihat benih-benih revolusi adanya jurang pemisah antara kaya dan miskin yang timbul akibat kebijakan Syah. Banyak petani miskin yang pergi ke kota-kota besar untuk mencari penghasilan yang layak, dan hal ini menimbulkan berbagai macam masalah-masalah sosial yang serius, diantaranya karena keterbatasan lapangan kerja diperkotaan, industri yang dibangun Syah lebih bersifat padat modal dari pada padat karya, ambisi Syah Iran Mohammad Reza Pahlevi untuk mempercepat proses modernisasi Negeranya, akan tetapi pada kenyataannya merupakan suatu permulaan keruntuhan kekuasaannya, berbagai macam kebijakan yang dijalankan Syah dibidang ekonomi, sosial politik dan budaya telah menimbulkan ketidakpuasan dikalangan rakyat banyak. Di bidang ekonomi strategi yang mengejar Gnp telah menimbulkan jurang semakin dalam antara yang kaya dan yang miskin, antara kota dan desa, antara kelompok elite dan penduduk pada umumnya. Petro dollar yang mengalir deras karena melimpahnya hasil produksi minyak lebih banyak digunakan untuk sektor industri dan sektor pertahanan dan keamanan (hankam), sebaliknya hanya sedikit yang dipergunakan untuk kepentingan rakyat banyak.⁴

³ Surwandono, *Op. Cit*, Hal. 8.

⁴ Maria Tamara, *Revolusi Islam Since 1979*, Jakarta, 1980.

Pembangunan ekonomi juga telah melahirkan berbagai eksese, diantaranya adalah tingginya tingkat korupsi dikalangan keluarga dan kerabat dekat Syah. Sehingga tercipta keadaan yang mencolok antara kemewaan golongan atas dibandingkan rakyat banyak yang hidup dalam kemiskinan.

Di bidang sosial budaya, Syah berusaha untuk mengurangi pengaruh Agama Islam yang telah mengakar kuat di masyarakat Iran, ia merubah penanggalan Hijriah (kalender Islam) dengan penanggalan Parsi, serta memberikan keleluasan bagi masuknya pengaruh kebudayaan Barat, Syah menjadi raja di Negara Islam, Namun tidak mempunyai perhatian terhadap Islam. Ia lebih menghargai Raja Cyrus Agung dari pada Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1971 diadakan upacara besar-besaran di depan makam Cyrus Agung (pendiri kerajaan Parsi), memperingati 2500 tahun berdirinya kerajaan Iran, serta dihadiri oleh beberapa pemimpin berbagai Negara.

Di bidang politik dalam Negeri, Syah berusaha menghapuskan peranan Ulama (Mullah), dan menggunakan cara-cara represif untuk menumpas lawan-lawan politiknya. Sedangkan dalam politik luar Negeri Syah sangat bergantung pada Amerika Serikat dan tetap memelihara hubungan diplomasi dengan Israel.⁵

Dalam artian luas revolusi merupakan perubahan radikal yang menyangkut Pemerintahan di suatu Negara dengan jalan kekerasan dan pertumpahan darah. Masyarakat yang terbelakang primitif atau masyarakat

⁵ M. Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran : Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya*

industri maju tidaklah rawan mengalami revolusi, Namun masyarakat yang dalam kategori Negara berkembang memiliki potensi yang tinggi untuk terancam revolusi, karena disinilah bibit revolusi menjalar seperti epidemi.⁶

Liberalisme ekonomi memberikan kesempatan yang besar untuk memperbesar diri dalam pencapaian tujuan secara tak teratur, sehingga hukum rimba berlaku. Homo Homini Lupus manusia menjadi Srigala bagi manusia lainnya dalam suatu masyarakat.⁷ sejalan dengan hal ini mengikat pula prosentase korupsi dikalangan pejabat, untuk menjadikanya dengan jalan pintas, dan dalam jangka panjang hal ini menyebabkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang semakin tajam. Dalam keadaan seperti itu rakyat seakan-akan tinggal menunggu datangnya tokoh-tokoh revolusi sebagai akserator dan memimpin rakyat untuk mendobrak norma-norma dan orde sosial yang ada. Walaupun demikian meletus atau tidaknya revolusi sangat bergantung pada respon atau jawaban elite terhadap gejala-gejala kebangkrutan sistem sosial yang berlaku kalau elite penguasa tidak mampu mengurangi beban penderitaan rakyatnya, kemungkinan revolusi akan meledak, apalagi kalau elite akan menunjukan kekerasan kepala (*intansingence*) dan menjawab kritik apa saja dengan brutal, seperti yang dilakukan Syah di Iran atau Somoza di Nikaragua maka dipastikan revolusi akan meledak.⁸

Adapun intensitas revolusi kebanyakan berbanding seimbang dengan penderitaan rakyat kecil. Ada lima faktor penyebab revolusi, yaitu pertama,

⁶ M. Amin Rais, *Cabang-bela Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung, 1997 Hal 120

adanya kontradiksi hakikat ekonomi dan hakikat politik dalam masyarakat, kedua, adanya jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin semakin melebar, ketiga, krisis finansial yang berlarut-larut, keempat, aliensi kaum intelegensia kian dalam, kelima, semuanya itu mennghadapi elite yang sombong, keras kepala dan brutal.⁹

Munculnya Ayatullah Khomeini mencuat diatas ketika Dinasti Pahlevi dalam keadaan sudah terguncang kekuasaannya. Ayatullah Imam Khomeini sering dihubungkan dengan dua hal yaitu Syiah dan Revolusi Iran. Syiah adalah salah satu Mazhab dalam Agama Islam yang mengakui bahwa Ali bin Abu Thalib sebagai Imam mereka dan sebelas keturunannya, yang lebih spesifik lagi Syiah Imamiyah Itsna Asyariayah (12 Imam), sebagai pengganti dari misi Kenabian yaitu Imamah (kepemimpinan), yang dipegang oleh para Imam. Soal Imam ini kurang dikenal dalam Mazhab Sunni yang mayoritas Umat Islam Indonesia.

Revolusi Iran yang dikobarkan oleh Imam Khomeini mempunyai cirri-ciri populis dan Religius. Keistimewaan dari revolusi Iran adalah bahwa seorang maha raja diraja yang memiliki tentara yang terkuat nomor lima di dunia, berhasil digulingkan oleh seorang Ulama tua yang sudah berumur lanjut, yang mungkin sepanjang hidupnya belum perna menyentuh senjata. Ayatullah Imam Khomeini mempergunakan sebagian besar hidupnya untuk berjuang menumbangkan Monarkhi Iran. Ia menentang

kenal putus asa dalam berjuang melawan Monarkhi. Pada tahun 1963, karena aktivitas politiknya, Imam Khomeini di penjara selama 8 bulan, kemudian ia diasingkan ke Irak selama 14 tahun, karena adanya persekongkolan antara Pemerintahan Iran dan Pemerintahan Irak sampai akhirnya Imam Khomeini diusir keluar dari Irak kemudian menuju Paris Perancis. Dari mana saja dan dengan cara apapun Imam Khomeini tidak pernah berhenti melancarkan serangan terhadap Rezim Syah, bahkan anaknya Sayyid Mustafa Khomeini Syahid akibat kekejaman dinas rahasia SAVAK.

Dalam berjuang modal utama Ayatullah Khomeini, Ia mengatakan bahwa menyerah kepada penindasan justru lebih tidak bermoral dari penindasan itu sendiri. Ia begitu yakin akan arti perjuangannya, karena itulah, berbagai kelompok yang berjuang melawan Rezim Syah Iran, bersatu dibawah komando Imam Khomeini baik kelompok Ulama (Mulla), intelektual (Rausyan Fekran), Pedagang (Bazaar), kelompok profesional, maupun rakyat jelata siap mengikuti perintahnya.

Imam Khomeini memang seorang kontroversial banyak yang pro dan kontra, KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur), pernah menulis, Khomeini adalah Malaikat bagi para pengikut-pengikutnya dan setan bagi musuh-musuhnya. Namun terlepas pro dan kontra, suka atau tidak, Khomeini telah hadir dan eksistensinya diakui oleh kawan maupun lawan, sejarah akan mencatatnya sebagai pemimpin besar pada abad ini. Kebesaran Ayatullah Khomeini tidak hanya kesuksesannya menjungkir balikan tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya modern yang dibangun Dinasti Pahlavi, namun

juga terlihat dari pemikiran-pemikirannya yang dalam kapasitasnya sebagai seorang Ulama kadangkala tampak kontroversial.

Revolusi Iran memang telah merubah sistem politik dan bentuk Negara Iran dari Monarkhi Absolut menjadi Republik Islam Iran. Bentuk Republik Islam secara resmi disetujui mayoritas (98,2 %), rakyat Iran melalui Referendum yang diadakan pada tanggal 1 April 1979, Sedangkan Undang-undang Dasar Republik Islam Iran disetujui mayoritas (99,5%), rakyat Iran melalui Referendum yang diadakan pada tanggal 3 Desember 1979.¹⁰

Di dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Dasar Republik Islam Iran di sebutkan : Pemerintahan Iran adalah Republik Islam yang telah disepakati oleh rakyat Iran, berdasarkan keyakinannya yang abadi atas Pemerintahan Al-Qur'an yang benar dan adil, menyusul Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Al-Udzma Imam Khomeini, yang dikukuhkan dalam Referendum Nasional yang dilakukan pada tanggal 10 dan 11 bulan Farvadin tahun 1365 Hijriah Syamsiah bertepatan dengan tanggal 1 dan 2 Jumadil Awal tahun 1399 Hijriah Kamariah dengan mayoritas 98,2 % dari Jumlah suara orang-orang yang berhak memilih memberikan suara persetujuannya.¹¹

Pemerintahan Iran berbentuk Republik tersebut, mempunyai kekhususan yang berbeda dari Republik yang pernah ada di dunia, seperti

¹⁰ *The Islamic Consultative Assembly of The Islamic Republik of Iran* (Tehran : Council for Ten Days Dawn Celebration, 1984, Hal. 11 dan 13

¹¹ *Undang-undang Dasar Republik Islam Iran*, Pasal 1

Republik Indonesia, Republik Thailand, Republik Rakyat Cina dan lain-lain. Kekhususan dari Republik Islam Iran adalah walaupun ada lembaga-lembaga politik seperti Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif pada umumnya di semua lembaga Pemerintahan termasuk Negara yang menggunakan Republik sebagai bentuk Negaranya. Kekhususan yang berbeda yaitu terlihat pada kekuasaan tertinggi berada pada Ulama (Faqih), yang dikenal dengan Sistem Pemerintahan "Wilayat-e Faqih" yaitu : kekuasaan tertinggi berada di tangan Ahli Agama dan Hukum Islam.

Dalam Eksperimen di Republik Islam Iran, Teo-Demokrasi di implementasikan dengan bentuk Wilayat-e Faqih mempresentasikan otoritas (Ulul Amr, Ahl Dzikir, Ulul Albab, Ulama), Sementara Parlemen dan mekanisme pemilu, merupakan representasi musyawarah, perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam Ulama-ulama Syiah maupun penerapan sistem politiknya menjadi kajian yang menarik bagi penulis untuk meneliti faktor-faktor yang melatar belakanginya, serta meneliti pemikiran-pemikiran Imam Khomeini tentang Pemerintahan Islam yang berlaku di Iran, tanpa menfikan pemikiran tokoh-tokoh Islam lainnya.

B. Latar Belakang Masalah

Ketika Revolusi Islam Iran telah meraih kemenangan, maka terjadilah apa yang sebelumnya di ramalkan yaitu ketertarikan Bangsa-bangsa Muslim bahkan Non-Muslim kepada Islam. Hal ini adalah salah satu dinatara dari pengaruh Revolusi Islam tersebut, karena Negar-negara Kolonial telah menyuatkan segala kegiatan untuk menhadani kegiatan

pengaruh Revolusi Islam tersebut. Karena itu, Ia lebih menyiapkan karena pengaruh Islam yang kian hari kian menguat. Sebab jika tidak maka adakah alasan bagi kita untuk menjelaskan kondisi Negara-negara Kolonial itu, meluasnya pengaruh-pengaruh prinsip-prinsip Islam di mana saja di dunia ini. Sama saja dengan mengumumkan berakhirnya kekuasaan dan kejahatan mereka.¹⁶ Kemenangan Revolusi Islam Iran telah memberikan makna yang benar tentang kerauhidan terhadap Allah SWT dan menafikan penghambaan terhadap selain-Nya. Hal ini telah memberikan semangat pada umat Islam di banyak tempat di dunia terhadap perasaan identitas dan kemuliaan mereka, sekaligus meniupkan spirit melawan kekuatan-kekuatan Kolonial yang congkak dan bertindak sewenang-wenang. Revolusi ini telah membuka kembali komitmen baru jihad Bangsa-bangsa. Diantara contoh kongkret mengenai lahirnya masa Jihad baru di tengah Bangsa-bangsa Islam adalah jihad umat Islam di Negara-negara Afrika, Asia dan Eropa. Seluruh kebangkitan bersumber dari daya tarik Islam dan kerinduan besar untuk mempraktikkan Hukum-hukum Tuhan serta perasaan bahwa Agama ini melambangkan kemuliaan dan keselamatan mereka.¹⁷

Perjalanan sejarah mengungkapkan tentang keadaan pertukaran budaya dan menjadi saksi atasnya. Hubungan yang terjalin di anatar Bangsa-bangsa telah mengantarkan mereka pada pertukaran dalam hal seperti : tata

¹⁶ ...

cara pergaulan, etika umum, Ilmu pengetahuan, gaya berpakaian, Agama, Bahasa dan lain-lain.

Dari sekian banyak pertukaran budaya dapat di jadikan suatu keberagaman dan bahkan mengubahnya. Seperti yang terjadi di Asia Tenggara, tepatnya di bagian Timur di wilayah Islam yaitu masuknya Islam ke Indonesia dan Malaysia, serta beberapa bagian penting di Benua India, melalui segelintir orang Iran. Penyebaran Islam di Indonesia tak terjadi lewat da'wah para Mubaligh, melainkan Bangsa Indonesia yang sekarang mayoritas penduduknya beragama Islam, berubah Islam melalui aktivitas Pedagang dan Pelancong dari Iran.

Hal ini dapat di lihat dari tradisi orang Indonesia yang memperingati Bulan Muharram dengan suatu peringatan dan perayaan dengan membuat berbagai macam bentuk makanan. Seperti dalam tradisi Jawa yaitu membuat bubur Sura (Suro), yang mana dalam tradisi ini dalam Syiah pada bulan Asyura atau Bulan kesepuluh dari Bulan Muharram di peringati sebagai hari Shahidnya Imam Husein bin Ali bin Abu Thalib, Cucu Rasul SAW. Bahas Sura (Suro) diambil dari Bahasa Arab yaitu Asyara yang mempunyai arti ke10. Namun untuk menyebut Asyara masyarakat Jawa susahnya minta ampun, yang mudah di ucapkan yaitu Sura (Suro) tanpa merubah maknanya. Tradisi ini bukan hanya di Pulau Jawa saja ada di berbagai Daerah di Indonesia seperti Padang, Minang Kabau dan lain-lain, yang menggunakan nama dan tradisi yang berbeda-beda, hal ini merupakan suatu fenomena yang tidak dapat kita hindari dan kita tutupi bahkan

peringatan Asyura (Sura) sudah mengakar dan membudaya sampai sekarang ini. Selain dari peringatan Bulan Sura, masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengenal dengan adanya tradisi berziarah, Tawasul melalui perantara para Waliyullah (kekasih Allah), yang mana dalam Syiah mempunyai suatu persamaan dalam tradisi Sunn, kecuali Wahabi yang mengharamkan berziarah, Tawasul dan lain-lain.

Berbagai macam pemikiran yang berkembang di Indonesia bukan hanya dari pemikiran-pemikiran dari Sunni namun dari Syiah juga ada, dengan munculnya beberapa Yayasan dan munculnya buku-buku yang mengupas tentang Ahlul Bait Nabi di tinjau dari pandangan Sunni dan Syiah. Beberapa Yayasan seperti :

Yayasan Muthahari (Bandung), Yayasan Al-Jawad (Bandung), Yayasan Al-Munthazar (Jakarta), Yayasan Mulla Shadra (Bogor), YAPI (Bangil), Yayasan Al-Muhibin (Probolinggo), Pesantren Al-Hadi (Pekalongan) dan beberapa lembaga pendidikan yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia.

Sebagaimana di laporkan dalam media Republika tentang Seminar yang diselenggarakan pada Tanggal 22 September 1997 dengan judul para Ulama sepakat sulit untuk pertemukan Faham Syiah Sunni, sangat rapi dan bagus.¹⁸ Dalam pernyataannya, peserta Seminar mengajukan kepada Pemerintah melalui Kejaksaan Agung RI, untuk melarang ajaran Syiah yang dianggap sumber destabilisasi kehidupan Bangsa, meminta Menteri

¹⁸ Republika, 22 September 1997, Hal.2.

Kehakiman menutup sejumlah Yayasan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan, supaya Kejaksaan Agung bekerja sama dengan MUI dan Balitbang Depag RI untuk meneliti buku-buku Syiah dan melarang dalam peredarannya, meminta Pemerintah, Menteri Penerangan RI (sebelum di hapus), agar mewajibkan semua penerbit menyerahkan buku-buku terbitannya untuk di sahkan oleh MUI, merupakan pernyataan yang mendirikan bulu roma. Ini belum pernah terjadi di zaman ini.¹⁹

Dalam pemikiran politik Islam terdapat tiga paradigma tentang hubungan antara Agama dan Negara.

Paradigma pertama, memecahkan masalah dikotomi tersebut dengan mengajukan konsep bersatunya Agama dan Negara. Agama (Islam) dan Negara dalam hal ini tidak dapat dipisahkan (integrated), wilayah Agama meliputi politik atau Negara, karenanya menurut paradigma ini Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan Negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Allah, karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan, dan konstitusi Negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (Syari'ah). Sifat teokratis Negara dalam pandangan Syiah dapat ditemukan dalam pemikiran banyak Ulama politik Syiah, Imam Khomeini, mengatakan bahwa dalam Negara Islam wewenang menetapkan hukum berada di tangan Tuhan, tidak ada seorangpun yang berhak menetapkan Hukum, dan yang boleh berlaku hanya Hukum Tuhan.²⁰

¹⁹ O.Hashem, *Syiah di Carl Syiah di Tolak*, Islamic Center Al-Huda, Jakarta, 1997, Hal.5

²⁰ Imam Khomeini, *Islam and Revolution, Writing and Declaration of Imam Khomeini* (terjemahan dan anotasi Hamid Al-Gar, Berkeley, 1991 Hal 52

Kendati demikian, pemikiran politik Iran kontemporer menolak penisbatan Republik Islam Iran dengan Negara teokratis. Sistem kenegaraan Iran memang menyiratkan watak demokratis, seperti di tunjukan pada asas distribusi kekuasaan berdasarkan prinsip Trias Politika dan pemakaian istilah Republik sebagai bentuk dari Negara itu sendiri. Paradigma ini dianut oleh kelompok Syiah, pemikiran politik Syiah memandang bahwa Negara (kepemimpinan atau wilayah) adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Menurut pandangan Syiah legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad SAW, melalui Imam Ali bin Abu Thalib dan sebelas keturunannya.

Berbeda dengan paradigma pemikiran Sunni, yang menekankan Ijma (mufakat) dan Bay'ah (baiat) kepada kepala Negara (Khalifah). Dalam paradigma Syiah menekankan wilayah (kecintaan dan pengabdian kepada Tuhan) dan Ismah (kesucian dari dosa kecil dan besar) yang hanya dimiliki oleh keturunan nabi (12 Imam dalam Syiah Imamiyah Istna Asyariyah), sebagai yang berhak untuk menduduki sebagai kepala Negara (Imam).²¹

Paradigma kedua, memandang Agama dan Negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini Agama memerlukan Negara, karena dengan Negara Agama dapat berkembang. Sebaliknya, Negara memerlukan Agama, karena dengan Agama Negara dapat berkembang dalam bidang etika dan moral. Pandangan

²¹ Lihat: Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, Austin, 1982, Hal.6

tentang simbiosis Agama dan Negara ini dapat ditemukan, dalam pemikiran al-Mawardi (wafat 1058), seorang teoritikus politik Islam terkemuka pada masa klasik di dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Negara (Imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara Agama dan mengatur dunia.²²

Pemeliharaan Agama dan pengaturan Dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Dalam konsep al-Mawardi tentang Negara, Syari'ah mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Dalam ungkapan lain al-Mawardi mencoba mengkompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti di isyaratkan dalam oleh agama dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepatutan atau kepatutan politik. Dengan demikian, sebenarnya al-Mawardi mengenalkan sebuah pendekatan pragmatis dalam menyelesaikan persoalan politik kalau dihadapkan dengan prinsip-prinsip agama. Konsep Farri-Izadi, yang menjadikan dasar simbiosis Agama dan Negara dalam pemikiran al-Ghazali, mempunyai akar sejarah pada pemikiran pra Islam Iran. Konsep ini mengandung arti kualitas tertentu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau kepala Negara, seperti pengetahuan, keadilan dan kearifan. Kualitas demikian diyakini bersumber dari Tuhan (*preordained*). Dengan menegaskan Farri -Izadi di dalam kepemimpinan Negara, al-Ghazali menegaskan dimensi keagamaan dalam

22

lembaga Negara. Jika demikian adanya, maka al-Ghazali seperti halnya al-Mawardi juga mengaskan suatu pendekatan realistik dalam melakukan rekonsiliasi antara identitas Agama dan realitas penyelenggara Negara.

Paradigma ketiga, bersifat sekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara Agama dan Negara, paradigma sekularistik menolak pendasaran Negara kepada Islam, menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari pada Negara. Salah satu pemrakasanya dalam paradigma ini adalah Ali Abd Al-Raziq, seorang cendekiawan muslim dari Mesir, pada tahun 1925. dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, yang menimbulkan kontroversi dan menyebabkan ia di pecat dari jabatannya sebagai Hakim Agama Mesir. Isyu sentral dalam bukunya, seperti dikutip oleh Muhammad Diya al Din al Rais adalah bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan kekhalifaan, termasuk kekhalifaan al-Khulafa al-Rasyidin. Bukanlan sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tapi sebuah sistem duniawi.¹⁹ Ali Abd al-Raziq menjelaskan pandangannya bahwa :Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu dan pula mendesakan kepada kaum muslim suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah, tapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan Negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial dan ekonomi yang kita miliki, dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.²⁰

¹⁹ Lihat, Muhammad Imarah, *al-Islam wa Ushul li Ali Abd al-Raziq*, Beirut, 1972, Hal.92.

²⁰ Ali Abd al-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Beirut, 1972 Hal. 42

Argumen utama Ali Abd al-Raziq, adalah bahwa kekhalifaan tidak mempunyai dasar baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Kedua sumber Islam ini tidak menyebut istilah Khilafah dalam pengertian Kekhalifaan yang pernah ada dalam sejarah. Lebih dari itu, tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang menentukan suatu bentuk sistem politik untuk didirikan oleh umat Islam.²¹ Menurut Ali, Nabi Muhammad SAW adalah semata-mata utusan Tuhan, bukan seorang kepala Negara atau pemimpin politik.²²

Dalam kaitan di atas, Ali Abd al-Raziq membedakan antara Agama dan politik, tepatnya antara misi kenabian dan aktivitas politik. Ia memberikan alasan yang cukup panjang dari perspektif teologis dan historis untuk membuktikan tindakan-tindakan politik Nabi Muhammad SAW, seperti melakukan perang, mengumpulkan Jizyah (harta rampasan), dan jihad, tidak berhubungan dan tidak merefleksikan fungsinya sebagai utusan Tuhan. Bagi Ali Abd al-Raziq, Islam adalah suatu entitas keagamaan (Wahdah Diniyyah) yang bertujuan untuk mewujudkan komunitas keagamaan yang tunggal (Jama'ah Wahidah) berdasarkan kesamaan keyakinan.

Dalam sejarah kontemporer tiga lingkaran yang tidak bisa dipisahkan adalah Ayatullah Khomeini, Iran dan Syiah. Artinya siapapun tidak bisa berbicara tentang Iran (kontemporer) tanpa menyebut Ayatullah Khomeini dan tidak berbicara tentang Syiah tanpa menyebut Edward Mortimer

sebelum terjadi revolusi islam iran perhatian barat terhadap aspek-aspek spiritual dunia islam termasuk minim, Arab dilihat dari minyak, masalah Palestina dan terorisme. Iran sendiri disimbolkan Syah. Hanya dengann kebangkitan Ayatullah Khomeini, katanya politik dan spiritualitas islam menjadi isu hangat di kalangan ahli strategi, politik, dan penulis.²³

Perhatian terhadap mazhab syiah, baik di dunia islam maupun barat. Dalam dekade 1800-an, memang tidak bisa dilepaskan dari peristiwa spektakuler yang terjadi di Iran. Keberhasilan revolusi Islam Irak yang digerakkan kaum Mullah(ulama) revolusi tersebut berhasil menjungkir balikkan tatanan social, politik, ekonomi, dan budaya modern yang di bangun Syah Pahlevi. Sedangkan keluar revolusi tersebut mengakibatkan perubahan cukup drastic pada peta politik di kawasan Timur Tengah, khususnya kawasan Teluk parsi, serta menimbulkan dampak cukup dahsyat dari segi religio-politik di dunia islam.

Namun siapa yang berkewajiban melaksanakan hukum itu? siapa yang dapat memrintahkan dengan adil?, Menurut Ayatullah Khomeini, hanya seorang penguasa yang dipilih oleh para Mujtahid sajalah, yang mengenal Perintah Tuhan dan mengamalkan keadilan tanpa terpenjara oleh tekanan dan ambisi dunia. Mereka inilah yang mampu mengemban tugas tersebut.²⁴ Sebuah sistem pemerintahan yang mengamalkan hukum Tuhan, yang mendapat pengawasan dari para ahli Hukum Agama (Faqih), akan mengungguli semua sistem pemerintahan yang tidak adil di dunia ini. Jika

²³ Edward Montimer, *Islam dan kekuasaan* (Bandung, Mizan, 1984), Hal.278

²⁴ *Ibid*, Hal.307.

kaum muslim melaksanakan hukum-hukum Tuhan, dan jika pemerintahan Islam sungguh-sungguh mengadakan mobilisasi umum, maka kaum Zionis tidak akan berani merebut tanah muslim dan menghancurkan Masjid al-Aqsa tanpa mendapat perlawanan dari rakyat secara langsung.

C. Perumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, maka dapat di jelaskan suatu perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah

“Bagaimana Pemikiran Imam Khomeni tentang Pemerintahan Islam.”?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian, Penulis bertujuan :

- a. Untuk mengetahui Konsep Pemikiran Imam Khomeini yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Islam yang diterapkan oleh Pemerintahan Republik Islam Iran.
- b. Untuk Mengetahui lebih dalam seorang tokoh Revolusi Islam Iran yang dapat merubah suatu Pemerintahan yang Otoriter Absolut, dengan Pemerintahan Islam sebagai Pemerintahan yang menjadikan manusia hidup dalam kedamaian dan hidup dalam kerukunan antar sesama warga Negara, walaupun mempunyai ideologi, agama, sosial yang berbeda-beda.

Manfaat Penelitian ini, antara lain :

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini memberikan pengalaman secara nyata dalam penyusunan proposal karya ilmiah dan penelitian ini juga memberikan pengetahuan tambahan

- b. Bagi instansi Pemerintahan, khususnya Pemerintahan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Penelitian ini memberikan Referensi dalam mengevaluasi Kebijakan Pemerintahan yang mementingkan Rakyat secara keseluruhan.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel dan hubungan antar variabel yang di dasarkan pada konsep dan definisi tertentu. teori merupakan unsur penting utama dalam melakukan suatu penelitian, karena teori mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencoba menjelaskan permasalahan atau fenomena yang ada.

Definisi Teori Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Teori adalah:

“ Serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang saling berkaitan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, yang di jabarkan dengan cara menghubungkan variabel satu dengan yang lainnya dan bertujuan untuk memberikan penjelasan atas fenomena tersebut.²⁵

1. Sistem Politik

Menurut David Easton yang di maksud dengan Sistem Politik adalah :

Merupakan alokasi dari pada nilai-nilai, di mana pengalokasian dari nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, IPBES, Jakarta, 1992 Hal 12

pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan.²⁶

Lebih lanjut lagi David Easton mengatakan bahwa Sistem politik dapat di perkenalkan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruhtingkah laku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.²⁷

Sedangkan menurut pendapat Robert A Dant dalam bukunya "Modern Political Analysis" yang dimaksudkan dengan sistem politik adalah sebagai pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia yang melibatkan sampai dengan tingkah yang berarti kontrol, pengaruh kekuatan atau wewenang.

Menurut Gabriel Almond yang dimaksud dengan sistem politik adalah : merupakan sistem interaksi yang terjadi di dalam masyarakat yang merdeka. Lebih lanjut lagi Gabriel Almond mengatakan bahwa sistem politik menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.

- a. Fungsi Integrasi yang dijalankan oleh Sistem Politik adalah untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan.

²⁶ Gabriel A. Almond and James. S. Coleman (eds), *The Politics of the Developing Areas*, Priceton University Press, N.J. 1960, halaman .6. mengutip dari David Esaton, *The Political System. An Inquiry into the State of political Science*. New York, 1953.

- b. Fungsi Adaptasi adalah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan, baik terhadap lingkungan masyarakat itu sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakat lainnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang dikemukakan oleh para ahli politik, maka dapat ditarik suatu pengertian sistem politik adalah merupakan sistem interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, melalui mana dialokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, dan pengalokasian nilai-nilai itu dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah.

Dari pengertian tersebut terdapat beberapa hal yang masih perlu di jelaskan.

1. Sistem Interaksi

Didalam sistem politik, baik yang Modern maupun yang tradisional, terjadi interaksi atau hubungan-hubungan antara aktor-aktor politik yang berinteraksi tersebut dapat berwujud individu-individu, sekelompok individu, suatu organisasi, maupun berwujud lembaga atau instansi. Jadi interaksi yang berlangsung di dalam sistem politik dapat berwujud interaksi antara suatu organisasi atau suatu lembaga dengan sesamanya.

2. Pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat

Yang dimaksud dengan nilai-nilai adalah merupakan sesuatu hal yang mempunyai harga yang tinggi di mata masyarakat. Diantara

... nilai-nilai yang mendasar

atau memperoleh penghargaan yang paling tinggi dari masyarakat. Suatu masyarakat akan berbeda dalam memberikan suatu nilai apalagi di bandingkan terhadap suatu nilai pada hakekatnya di sebabkan oleh perbedaan kebutuhan dari masing-masing masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai yang terdapat dan dibutuhkan masyarakat menurut Harold Laswell terdiri dari delapan nilai yaitu : power, enlightenment, wealth, well-being (or health), skill, affection, rectitude, (involve righteousness and justice), and deference (or respect). Selain ke-8 nilai tadi ditambahkan oleh Karl W. Deutsch, dua nilai lagi yaitu: security and liberty.²⁸ kesepuluh macam nilai tersebut dialokasikan kepada masyarakat dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah.

3. paksaan yang sedikit banyak bersifat sah

Pengertian atau peristilahan sedikit banyak bersifat sah adalah untuk memberikan gambaran bahwa paksaan fisik yang dilakukan dalam suatu sistem politik keabsahannya diragukan. Keraguan-raguan terhadap keabsahan paksaan fisik ini, terutama di tunjukan kepada sistem politik yang totaliter, dan segala macam bentuk kekuasaan pemerintahan yang lainnya yang tingkat keabsahannya dalam mempergunakan paksaan fisik diragukan. Akan tetapi apabila di pergunakan atau di cantumkan istilah sedikit banyak bersifat sah, maka jenis sistem politik, apakah sistem politik itu totaliter ataupun

²⁸ Karl W. Deutsch, *Politics and Government: How People Decide Their Fate*, Harvvard Univ. Press, 1957.

demokratis, akan dapat tercakup di dalam pengertian atau batasan di atas.

Ciri-ciri sistem politik

Menurut Gabriel A Almond di dalam bukunya *The politics of the Developing Areas*, menyebutkan bahwa di dalam sistem politik terdapat empat macam ciri atau karakter, sebagai berikut :

1. Semua sistem politik pasti mempunyai struktur politik, dengan pengertian bahwa di dalam masyarakat yang paling sederhana, sistem politik dari masyarakat tersebut mempunyai tipe struktur politik yang paling kompleks. Tiap-tiap tipe struktur politik dapat di perbandingkan satu dengan yang lain. Menurut tingkat dan bentuk strukturnya.
2. Semua sistem politik, baik yang modern maupun yang masih primitif, menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda-beda yang di sebabkan oleh karena perbedaan struktur. Demikian pula dapat di perbandingkan bagaimana fungsi-fungsi sistem politik itu di jalankan dan bagaimana pula cara atau gaya melaksanakannya.
3. Semua sistem politik, betapapun terspesialisasikan tetap mempunyai sifat multi fungsional (menjalankan beberapa fungsi atau banyak fungsi), sistem politik dapat di bandingkan menurut tingkat kekhususan di dalam struktur itu.
4. Semua sistem politik adalah merupakan sistem campuran, apalagi di pandang dari pengertian kebudayaan. Dalam pengertian yang rasional

tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern, dan dalam pengertian yang tradisional tidak semuanya primitif, perbedaannya bersifat relatif.

Menurut David Easton bahwa ciri-ciri yang utama dari sistem politik adalah sebagai berikut :

1. Ciri-ciri identifikasi

untuk membandingkan suatu sistem politik dengan sistem-sistem sosial lainnya, kita harus dapat mengidentifikasikan atau mengenali sistem politik dengan mendeskripsikan unit-unitnya yang fundamental dan menetapkan batas-batas yang memisahkannya dari unit-unit yang berada diluar sistem politik.

a. Unit-unit suatu sistem politik

Unit-unit ini adalah merupakan elemen-elemen atau unsur-unsur yang dinyatakan membentuk suatu sistem. Dalam hal sistem politik, elemen atau unsur tersebut adalah berwujud tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas politik. Biasanya, berfaedah sekali memperhatikan tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas tersebut, selama mereka menyusun atau membentuk peranan-peranan politik dan kelompok-kelompok politik.

b. Batas-batas

Beberapa pertanyaan yang paling penting yang berkenaan dengan operasinya sistem politik hanya dapat di jawab jika kita

1. Apakah suatu sistem tidak ada yang eksis di dalam

suatu lingkungan yang vakum atau kosong. Sistem selalu berada di dalam lingkungan. Cara bekerjanya suatu sistem merupakan bagian dari fungsi sistem tersebut untuk menanggapi lingkungan-lingkungan sosial, biologi, dan fisik.

2. Input dan Output

Input adalah merupakan masukan yang berfungsi sebagai energi atau bahan bakar untuk menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik. Input yang terdapat di dalam sistem politik dapat berasal dari lingkungan sistem politik maupun berasal dari dalam sistem politik itu sendiri. Input yang masuk ke dalam sistem politik dapat di bedakan menjadi dua jenis yaitu, berupa tuntutan dan berupa dukungan.

Sedangkan yang di maksud dengan Output adalah merupakan hasil atau konsekuensi dari bekerjanya suatu sistem politik. Hasil keputusan tersebut berupa keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya otoritatif, yang harus di patuhi dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Gabriel A Almond dalam bukunya "The Politics of the Developing Areas",²⁹ mengatakan bahwa fungsi Input dan Output di kelompokkan sebagai berikut:

- a. Fungsi Input terdiri atas
 1. Sosialisasi politik
 2. Artikulasi kepentingan

²⁹ Gabriel A Almond and James S. Coleman (eds), *The Politics of the Developing Areas*, Princeton

3. Agregasi kepentingan
 4. Komunikasi politik
- b. Fungsi Output terdiri atas
1. Pembuatan peraturan
 2. penerapan peraturan
 3. Ajudikasi peraturan
 4. Diferensiasi dalam suatu sistem

2. Pemerintahan Islam

Pemerintah menurut R.Mac.Iver seperti dikutip oleh Inu Kencana Syafeii adalah sebagai berikut :

Pemerintah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa di perintah.

Menurut Mariun secara singkat menjelaskan tentang pengertian Pemerintah dan Pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Istilah Pemerintahan menunjukan pada bidang-bidang atau lapangan, fungsi, bidang tugas penting.
- 2) Istilah Pemerintah menunjukan pada badan atau organisasi atau alat perlengkapan yang menjelaskan fungsi itu.³⁰

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang pengertian Pemerintah dalam arti luas dan sempit sebagai berikut :

- 1) Pemerintah dalam arti luas : “ Segala sesuatu tugas kewenangan atau kekuasaan Negara yang kalau mengikuti pembagian Montesquieu meliputi bidang Eksekutif, Legislatif, Yudikatif.
- 2) Pemerintah dalam arti sempit. “ diartikan sebagai tugas atau kewenangan atau kekuasaan dalam bidang Eksekutif saja.

Dalam Tipologi Intervensi Pemerintah dalam the *laissez-faire* Society (masyarakat bebas), Menurut Adam Smith (1979 : 208-209) seperti yang dikutip oleh Sri Mulyani, tugas Pemerintah adalah :

- 1) Melindungi Masyarakat dari kekerasan dan invansi yang mungkin dilakukan oleh masyarakat lain (sebagai badan pertahanan).
- 2) Melindungi individu dalam masyarakat dari ketidakadilan yang mungkin dilakukan oleh individu lain dalam masyarakat tersebut (administrasi dan keadilan).
- 3) Membangun sarana infrastruktur daaan menyediakan barang dan jasa public.³¹

Sedangkan Menurut Anerson (1989 : 19-22) seperti yang dikutip oleh Sri Mulyani adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan Infra Struktur
- 2) Menyediakan barang dan jasa public.
- 3) Menyelesaikan konflik antar kelompok
- 4) menumbuhkan dan memelihara kompetisi.
- 5) Mejaga ke'estarian Sumber daya.

³¹ Sri Mulyani, *Peranan Pemerintah dalam Mekanisme Pelayanan Publik di unit Pelayanan*

- 6) Menjaga agar setiap warga Negara dapat memiliki atau mempermudah barang dan jasa publik taraf minimal yang di butuhkan.
- 7) Menjaga Stabilitas Ekonomi.³²
 - a. Demokrasi

Konsep Demokrasi berasal dari kata Yunani yang mana terdiri dari dua kata yaitu Demos yang berarti Rakyat, dan Kratos yang berarti Kekuasaan atau berkuasa. Dengan kata lain Rakyat berkuasa atau Governmen or rule by the people. Dan ada berbagai macam Istilah Demokrasi yang dianut oleh berbagai macam Negara-negara di dunia seperti : demokrasi Konstitusional, demokrasi Parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi Rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi Nasional dan sebagainya. Setelah perang dunia ke II, secara formil demokrasi merupakan suatu dasar dari kebanyakan Negara di dunia. Menurut suatu penelitian dari UNESCO pada tahun 1949 maka “ mungkin untuk pertama kali dalam Sejarah demokrasi dinyatakan dalam demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem politik dan sosial yang di perjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.

Dari sekian Akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambiguity atau mempunyai arti dua, sekurang-kurangnya ada ambiguity atau ketaktentuan “ mengenai

lembaga-lembaga atau cara-cara yang di pakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kulturil secara histories yang mempengaruhi istilah, ide dan praktek demokrasi.³³

Banyak aliran pemikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok yang menamakan dirinya demokrasi, akan tetapi pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas Komunisme. Kedua aliran ini pada mulanya berasal dari Eropa, akan tetapi setelah perang dunia ke II, nampaknya juga di dukung oleh beberapa Negara baru di Asia, India, Pakistan, Filipina dan Indonesia. Mencita-citakan demokrasi Konstitusional, sekalipun terdapat berbagai macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam Negara-negara tersebut. Di lain pihak ada Negara-negara baru di Asia yang mendasarkan dirinya atas azas-azas Komunisme, yaitu : RRC, Korea Utara dan sebagainya.

1. Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga Negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam Konstitusi, maka pemerintahan semacam ini biasanya di sebut sebagai

³³S.I. Benn and R.S. Peters, *Principles of Political Thought*. New York : Collier Books, 1964,

pemerintahan yang beradaskan pada Konstitusi. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu di batasi perna di rumuskan oleh seorang Ahli Sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintah selalu di selenggarakan oleh Manusia dan bahwa Manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan.sebagaimana dalilnya yang sudah terkenal sebagai berikut : Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi Manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya.

Pada waktu demokrasi Konstitusioaaanil muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkrit, yaitu pada akhir abad ke 19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan Negara sebaiknya di selenggarakan dengan suatu Konstitusi tertulis, yang daaengan tegas menjamin Hak-hak Asasi dari warga Negara. Di samping itu kekuasaan di bagi sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan di perkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan Yuridis dari prinsip-prinsip ini adalah istilah *Decentral (Negara Uniform)* dan *Dual* ³⁴

Akan tetapi demokrasi tidak merupakan sesuatu yang statis, dan dalam abad ke-20. terutama sesudah perang dunia ke II Negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan Negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama. sekarang Negara turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karena itu harus berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan warga Negaranya. Gagasan ini dituangkan dalam konsep mengenai Welfare State (Negara Kesejahteraan) atau Sosial Service State.

Demokrasi dalam abad ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja, sebagaimana dalam abad ke-19, tetapi meluas mencakup juga segi-segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi ekonomis. Perkembangan ini telah terjadi secara pragmatis sebagai hasil dari usaha mengatasi tantangan-tantangan yang di hadapi dalam abad ke-20. lagi pula perkembangan ini telah terlaksana secara Evolusioner.

Unsur-unsur Rule of Law dalam arti yang klasik, seperti yang di kemukakan oleh A.V. Dicey dalam Introduction to the Law of the Constitution mencakup :

- a. Supremasi aturan-aturan Hukum (Supremacy of the Law), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh

- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi Hukum. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya Hak-hak Manusia oleh Undang-undang (di Negara-negara lain oleh Undang-undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.³⁵

Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law ialah :

- a. Perlindungan Konstitusionil, dalam arti bahwa Konstitusi, selain dari menjamin Hak-hak Individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang di jamin
- b. Badan Kehakiman yang bebas tidak memihak
- c. Pemilihan Umum yang bebas
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi
- f. Pendidikan Kewarganegaraan.³⁶

Menurut Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi sebagai berikut : Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijakan umum yang di

³⁵ Seperti di sebut dalam *E.C.S Waee and G. Godfrey, Constitutional Law : An Outline of the Law and Practice Central and Local Government, the Citizen and the State and administrative Law* (7th ed.: London Longmans, 1965), Hal.50-51. *Ibid*, Hal.58.

³⁶ *Sout-East Asian and Pacifik Conference of Jurists*, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age* (Bangkok: International Commission of

tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan³⁷

Lebih lanjut menurutnya, demokrasi di dasari beberapa nilai-nilai yang taercakup di dalamnya dan nilai-nilai tersebut adi rumuskan seperti :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan, yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk di perjuangkan. Dan perselisihan ini harus dapat di selesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, consensus atau mufakat.
2. Menjamin terselenggaranya Perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan diri terjadi perubahan social, yang di sebabkan oleh faktor-faktor seperti majunya teknologi, perubahan dalam kepadatan penduduk dalam pola-pola perdagangan dan lain-lain. pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaanya dalam pearubahan-perubahan ini dan sedapat mungkin membinaanya dengan

Untuk melaksanakan Nilai-nilai demokrasi perlu di selenggarakan beberapa lembaga-lembaga sebagai berikut :

1. Pemerintah yang bertanggung jawab
 2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui Pemilihan Umum yang bebas dan rahasia. Dan Dewan Perwakilan ini mengadakan pengawasan atau control yang memungkinkan oposisi yang Konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinu.
 3. Suatu Organisasi Politik yang mencakup satu atau lebih Partai Politik. Partai politik menyelenggarakan hubungan yang kontinu anatar masyarakat umumnya dan pemimpin-pemimpinnya.
 4. Pers dan Media Massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
 5. sistem Peradilan yang bebas untuk menjamin Hak-hak Asasi Manusia dan mempertahankan keadilan.
2. Demokrasi dalam Terminologi Komunis

Demokrasi dalam arti ini di pakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi Proletar dan demokrasi Soviet (seperti

Rakyat (yang di pakai dalam Negara-negara Eropa Timur sesudah berakhirnya Perang Dunia Ke-II)

Semua istilah demokrasi ini berlandaskan aliran dari pemikiran Komunisme atau Marxisme-Lenisme (ajaran Marx seperti yang di tafsirkan oleh Lenin). Pada permulaan abad ke-19 keadaan kaum buruh di Eropa Barat sangat menyedihkan. Kemajuan Industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang sangat rendah, jam kerja yang panjang, tenaga wanita dan anak yang di salah gunakan sebagai tenaga murah, keadaan dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan dan lain-lain. Dalam keadaan seperti ini menggugah hati orang banyak antara lain Cendikiawan-cendikiawan seperti Robert Owen di Inggris (1771-1858), Sain Simon (1760-1825) dan Fourier (1772-1837) di Perancis untuk mencoba memperbaikinya.

Mereka semua terdorong oleh perasaan yang bersifat manusiawi, tanpa di sertai tindakan-tindakan maupun konsepsi yang nyata mengenai tujuan dan strategi dari perbaikan itu, sehingga oleh orang lain teori-teori mereka dianggap angan-angan belaka. Karena itu mereka di sebut kaum Sosialis Utopi (Utopia = dunia Khayalan). Karl Marx (1818-1883) dari Jerman banyak mengecam keadaan ekonomi dan sosial sekelilingnya, akan tetapi ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat di perbaiki secara tambal sulam dan harus di ubah secara radikal melalui pendobrakan sendi-

Sosial yang menurutnya di dasari oleh Hukum-hukum Ilmiah dan karena itu pasti akan terlaksana. Untuk membedakan ajarannya dari gagasan Sosialis Utopi Ia menamakan ajarannya Sosialisme Ilmiah.

Ketika Ia di keluarkan dari Negaranya, Jerman. Kemudian Ia menetap di London dan bekerja sama dengan Friedrich Engels dan menerbitkan beberapa karya-karyanya diantaranya yang terkenal yaitu : Manifesto Komunis dan Das Kapital. Yang mana dalam beberapa tulisannya mencakup hampir semua sendi kehidupan dalam masyarakat. Mengenai beberapa ajarannya seperti Materialisme Dialektis, Materialisme Historis dan pandangannya tentang Negara dan Demokrasi.

Dalam menyusun teori mengenai perkembangan masyarakat Ia tertarik oleh gagasan seorang Filsuf Jerman George Hegel (1770-1831) mengenai dialektik. Dan kemudian Filsafat Hegel di manfaatkan oleh Marx bukan menjadi seorang Filsuf sendiri, tetapi untuk mengubah masyarakat secara radikal. Menurutnya “ Semua Filsafat hanya menganalisa masyarakat, tetapi masalah sebenarnya ialah bagaimana mengubahnya.” Hegel menganalisa bagaimana panca-indra Manusia yang terbatas kemampuannya berusaha untuk menangkap kebenaran, Ia berpendapat bahwa apa yang dianggap oleh Manusia sebagai kebenaran sebenarnya hanya merupakan sebagian saja dari kebenaran itu. Kebenaran dalam keseluruhannya hanya dapat di tangkap oleh pikiran Manusia

... melalui dialektik (proses dari thesis melalui antithesis menuju ke

synthesis, kemudian mulai lagi dari permulaan dan begitu seterusnya).sampai kebenaran yang sempurna tertangkap.

Dalam menjelaskan proses dialektik Hegel mengatakan bahwa proses ini dilandasi oleh dua gagasan : pertama, gagasan bahwa semua berkembang dan terus menerus berubah. Kedua, gagasan bahwa semua mempunyai hubungan satu sama lain.Marx tertarik oleh gagasan dialektik Hegel, karena di dalamnya terdapat unsur kemajuan melalui Konflik dan Pertentangan. Dan unsur inilah yang ia perlukan dalam menyusun teorinya mengenai perkembangan masyarakat melalui Revolusi.

Untuk melandasi teorinya ia merumuskan teori Materialisme dialektis, yang kemudian konsep-konsep itu di pakainya untuk menganalisa Sejarah Perkembangan Masyarakat yang di namakan Materialisme Historis. Atas dasar analisa terakhir ia sampai kepada kesimpulan bahwa Hukum Ilmiah dunia Kapitalis akan mengalami Revolusi (yang olehnya di sebut Revolusi Proletar) yang akan menghancurkan sendi-sendi masyarakat itu, dan akan meratakan jalan untuk timbulnya masyarakat Komunis³⁸ Beberapa gagasan Lenin, Pertama, Melihat pentingnya peranan kaum tani dalam menyelenggarakan Revolusi (Marx hanya melihat peranan kaum buruh). Kedua, Melihat peranan suatu Partai Politik yang Militan yang terdiri “ Profesional revolutionaries” untuk memimpin kaum Proletar (Marx berpendapat bahwa kaum Proletar akan menghancurkan sendi-sendi). Dan memprediksi apa yang

merebut kekuasaan. Ketiga, Melihat Imperialisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup Kapitalisme (Marx berpendapat bahwa Kapitalisme pada puncak perkembangannya akan menemui ajalnya dan di ganti oleh Komunisme), sehingga sampai saat itu belum mati. Lenin juga mengintrodisir istilah Sosialisme untuk masa yang oleh Marx di sebut tahap pertama masyarakat Komunis.

Stalin memimpin Uni Soviet dengan tangan besi dari 1924 sampai 1953, dan melebihi Lenin dalam menonjolkan sifat menindas dari Rezimnya. Pada tahun 1936 Undang-undang Dasar lama diganti dengan Undang-undang baru secara Formil menetapkan tercapainya Sosialisme dan berakhirnya tahap Revolusi. Dengan demikian secara resmi di mulai tahap kedua, yaitu menyelenggarakan transformasi masyarakat kearah masyarakat Komunis. Salah satu gagasan Stalin yang menyimpang dari gagasan Marx mengenai Revolusi ialah bahwa Komunisme dapat di selenggarakan di selenggarakan di suatu Negara dulu yaitu Uni Soviet. Namun gagasan ini di tentang oleh Trotzky yang berpendapat bahwa Revolusi harus berjalan terus menerus dan di seluruh dunia.³⁹

Kruschchev berhasil menguasai Uni Soviet sebagai hasil perebutan kekuasaan diantara pemimpin-pemimpin teras. Dan Ia melancarkan gerakan De-Stalialisasi yang melalui Kongres Partai Komunis Uni Soviet yang ke-20 yang di adakan pada tahun 1956. dalam proses ini Stalin

Uni Soviet dan karena telah kultus individu. Dan doktrin Marxisme-Lenisme di tinjau kembali setelah perang Dunia ke-II baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri. Proses Liberalisasi yang diakibatkan oleh gerakan De-Stalinisasi itu mempunyai pengaruh besar atas Negara-negara Komunis lainnya. Pimpinan Moskow semasa hidup Stalin di taati oleh Negara-negara Komunis lainnya, khususnya Eropa Timur, mulai kendor dan timbulnya gagasan mengenai Poly Centrisme, yakni bahwa pusat Komunisme tidak lagi terbatas pada satu tempat saja (Moskow), tetapi terdapat di berbagai pusat (yaitu di Negara-negara Komunis masing-masing). Supremasi Uni Soviet terhadap Negara-negara Komunis lainnya sudah berkurang dan di tantang oleh Mao Tse Tung yang menganggap dirinya penafsir yang paling murni ajaran Marxisme-Lenisme. Gagasan Khushchev di namakan olehnya Neo-Revisionisme.

Golongan Komunis selalu bersifat ambivalent terhadap Negara. Menurut Marx dan Engels Negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang di pakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain. dan lebih lanjut lagi mengatakan bahwa Negara hanya merupakan suatu Lembaga transisi yang di pakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan.” Selama kaum Proletar masih memakai Negara, mereka tidak memakainya untuk memperjuangkan kebebasan tetapi untuk menindas lawan-lawan, dan pada saat tercapainya kebebasan Negara melenyap⁴⁰ Negara akhirnya akan lenyap pada saat Komunisme tercapai karena tidak

⁴⁰ V. I. Lenin, *State and Revolution* (New York: Intemasional Publisher, 1922), Hal 73. Mengutip

ada lagi yang tertindas. Lenin mendukung sepenuhnya dua gagasan Marx. Bahwa diktatur kaum Proletar, yang merupakan transisi dari masyarakat Kapitalis ke masyarakat Komunis, merupakan arti dalam kata. Di katakana bahwa diktatur Proletar merupakan organisasi pelopor dari orang-orang yang di tindas, sebagai kelas penguasa untuk menjadikan kaum penindas.⁴¹

Mengenai melenyapnya Negara dengan tercapainya Komunisme di katakana oleh Lenin bahwa Negara akan lenyap sama sekali manakala masyarakat menerima prinsip bahwa “ Setiap orang bekerja menurut kesanggupannya, setiap orang menerima menurut kebutuhannya.”

Untuk melenyapkan sebuah Negara menurut Stalin ada dua syarat yaitu : Syarat Intern (yang di kemukakan oleh Marx dan Lenin), bahwa sistem ekonomi harus berdasarkan prinsip ekonomi “ Distribusi menurut kebutuhan”, di tambah syarat Ekstern (gagasan baru dari Stalin) bahwa pengepungan oleh Negara-negara Kapitalis harus berakhir dari Sosialisme menang di seluru dunia.

Komunisme bukan hanya merupakan Sistem politik, akan tetapi juga merupakan suatu gaya hidup yang berdasarkan Nilai-nilai tertentu.⁴²

1. Gagasan Monisme (sebagai lawan dari Pluralisme). Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat sebab di anggap bahwa setiap golongan yang berlainan aliran pikirannya merupakan perpecahan. Akibat dari gagasan ini ialah bahwa persatuan mau di paksakan dan oposisi di tindas.

2. Kekerasan di pandang sebagai alat yang sah yang harus di pakai untuk mencapai Komunisme. Paksaan ini di pakai dalam dua tahap. Pertama, terhadap musuh, Kedua, terhadap pengikutnya sendiri yang dianggap masih kurang insaf.
3. Negara merupakan alat untuk mencapai Komunisme, karena itu semua alat kenegaraan seperti : Kepolisian, Tentara, Kejaksaan di pakai untuk di abadikan kepada tercapainya Komunisme. Hal ini mengakibatkan suatu Intervensi Negara yang sangat luas dan mendalam di bidang Politik, sosial, budaya dan Hukum yang dianggap tidak sebagai " a good in itself", akan tetapi sebagai alat Revolusi untuk mencapai masyarakat Komunis.

Menurut peristilahan Komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi khusus diktatur Proletar. Bentuk ini tumbuh dan berkembang di beberapa Negara Eropa Timur seperti : Cekoslovakia, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria Yugoslavia dan Tiongkok. Menurut Georgi Dimitrov, Demokrasi rakyat adalah : Negara dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin perkembangan Negara kearah Sosialisme. pertumbuhan demokrasi di tiap Negara-negara berbeda-beda sesuai dengan situasi sosial dan politik setempat. di Negara Eropa Timur secara resmi terdapat sistem multi-partai dengan kedudukan serta peranan partai Komunis yang dominant. Hal ini di sebabkan oleh perkembangan selama dan sesudah perang Dunia ke-II ketika terjadi kedudukan. Maka Jerman atau Negara-negara Eropa Timur memaka

golongan-golongan lainnya dalam masyarakat setempat dalam rangka melancarkan perlawanan terhadap tentara pendudukan. Setelah Nazi Jerman dapat di tundukan, pasukan-pasukan Uni Soviet yang tergabung dalam tentara Merah mengambil alih kekuasaan. Berkat kehadiran dan kekuatan Tentara Merah itu, Partai-partai Komunis setempat umumnya merupakan minoritas berhasil merebut pucuk kepemimpinan dan kekuasaan pemerintah.

b. Islam

Islam adalah Agama yang di turunkan oleh Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan dirinya dan dengan sesama manusia.⁴³

Definisi ini diambil dari beberapa Nash, Al-Qur'an dan Al-Hadis. definisi itu sendiri merupakan Deskripsi Realiti, yang mempunyai ciri khas : Jami' (mencakup semua aspek realiti yang di deskripsikan) dan Mani' (mencegah semua aspek yang tidak masuk akal dalam deskripsi). Batasan dari Islam, adalah Agama yang diturunkan oleh Allah SWT, telah mengecualikan Agama yang disifatkan sebagai agama yang tidak diturunkan oleh Allah SWT, seperti : Hindu, Budha, Confucious, Sintoisme dan lain sebagainya. Sedangkan batasan Nabi Muhammad SAW, mengecualikan Agama yang lain, selain agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, baik agama yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, Isa AS maupun kepada Nabi atau Rasul

⁴³ Samik, Aahif An Zai Al Islam Wa Edukasi Al Islam Tersebut, hal 66

lainnya. batasan yang mengatur hubungan Manusia dengan Allah SWT, dengan dirinya dan dengan sesama manusia, meliputi seluruh urusan mulai dari urusan Dunia sampai Akhirat, seperti : Pahala, Dosa, Surga, Neraka, Aqidah, Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya dan sebagainya. Allah Berfirman : “ Sesungguhnya Agama (yang di ridhai) di sisi Allah SWT hanyalah Islam (QS. Al-Imran 19).

Ayat ini menjelaskan tentang kedudukan Islam sebagai Agama Samawi yang diturunkan Allah kepada manusia. hal ini mempunyai arti bahwa, Agama selain Islam yang pernah diturunkan Allah tidak diakui olehNYA. Setelah diturunkannya Islam dengan dikuatkan oleh Firman Allah yaitu : Hari ini telah Aku sempurnkan untuk kamu agama, dan telah Aku cukupkan untuk kamu nikmatku, serta Aku ridhai Islam sebagai Agama kamu (QS. Al-Maidah 3).

Kemudian Allah berfirman :Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai Agama, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi (QS. Al-Imran 85).

Islam bukan hanya Agama yang mengatur masalah Ruhiah (spritual) akan tetapi meliputi masalah-masalah politik, dengan kata lain Al-Aqidah Ar-Ruhiah Wa-As-Siyasiyah. Al-Aqidah Ar-Ruhiah (aqidah spritual) adalah aqidah yang mengatur masalah yang berkaitan dengan Akhirat, seperti, Surga, Neraka, Pahala, Dosa dan masalah yang berkaitan dengan Ibadah, Shaalat, Puasa, Jihad daan lain-lain. Al-Aqidah As-Siyasiyah adalah Aqidah yang mengatur masalah kehidupan seperti: Ekonomi, Sosial, Politik, Pemerintahan, Pendidikan, Hukum dan sebagainya

Islam adalah Agama yang mengandung Aqidah dan Sistem (Nizam) dengan kata lain Islam adalah Agama yang mengandung Aqidah dan Syariah.⁴⁴ Yang di maksud dengan Aqidah disini adalah : Iman kepada Allah SWT, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir, Qadha dan Qadhar. Sedangkan Nizam atau Syariah adalah kumpulan hukum-hukum Syara yang mengatur masalah manusia. Oleh karena itu Sistem atau Syariat Islam merupakan hukum yang mencakup semua urusan, walaupun di jelaskan secara umum dan Global oleh Sumber utamanya yaitu : Al-Quran dan As-Sunah. Sedangkan penjelasannya di serahkan pada Mujtahid, yang mana menimbulkan suatu perbedaan paham satu sama lain munculnya Sunni dan Syiah.

1. SYIAH : Satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Talib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Dari segi bahasa, kata Syiah berarti pengikut, kelompok atau golongan, seperti yang terdapat dalam surah as-Saffat ayat 83 yang artinya : "Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh)." Para penulis sejarah Islam berbeda pendapat mengenai awal mula lahirnya Syiah. Sebagian menganggap Syiah lahir langsung setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Ansar di Balai

⁴⁴ Mahmud Sualat, *Al-Islam : Aqidah Wa Sunnah*, halaman 11, dan Sunnah Teori dan As

Pertemuan Saqifah Bani Sa'idah. Pada saat itu muncul suara dari Bani Hasyim dan sejumlah kecil Muhajirin yang menuntut kekhalifahan bagi Ali bin Abi Talib⁴⁵. Sebagian yang lain menganggap Syiah lahir pada masa akhir kekhalifahan Usman bin Affan (memerintah dari tahun 644-656) atau pada masa awal kepemimpinan Ali bin Abi Talib. Pada masa itu terjadi pemberontakan terhadap Khalifah Usman bin Affan yang berakhir dengan kematian Usman dan ada tuntutan umat agar Ali bin Abi Thalib bersedia dibaiat sebagai khalifah. Pendapat yang paling populer adalah bahwa Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Khalifah Ali dengan pihak pemberontak Mu'awiyah bin Abu Sufyan di Siffin, yang lazim disebut sebagai peristiwa *at-tahkim* atau arbitrase. Akibat kegagalan itu, sejumlah pasukan Ali memberontak terhadap kepemimpinannya dan keluar dari pasukan Ali. Mereka ini disebut golongan Khawarij (orang-orang yang keluar).⁴⁶ Sebagian besar orang yang tetap setia kepada Khalifah disebut *Syi'atu 'Ali* (pengikut Ali). Pendirian kalangan Syiah bahwa Ali bin Abi Talib adalah imam atau khalifah yang seharusnya berkuasa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW telah tumbuh sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, dalam arti bahwa Nabi Muhammad SAW sendirilah yang menetapkannya. Dengan demikian menurut Syiah, inti dari ajaran Syiah itu sendiri

⁴⁵ S.H.M. Jafri, *Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syiah : Dari Saqifah sampai Imamah*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1989, Hal.9-133.

⁴⁶ Enghar Dahmen, *Islam Berakhlak*, Pustaka Bandung, 1984, Hal.245-246.

telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, terlepas dari semua pendapat tersebut, yang jelas adalah bahwa Syiah baru muncul ke permukaan setelah dalam kemelut antara pasukan Ali dan pasukan Mu'awiyah terjadi pula kemelut antara sesama pasukan Ali. Di antara pasukan Ali pun terjadi pula pertentangan antara yang tetap setia kepada Ali dan yang membangkang. Setelah Wafatnya Imam Ali bin Abi Talib pada tahun 40 H akibat di bunuh dengan pedang yang beracun oleh Abdur Rahman bin Muljam, kursi kekhalifahan beralih kepada Hasan bin Ali. Kekuasaan Hasan bin Ali tidak bertahan lama karena pendukungnya makin lama makin berkurang. Sementara itu, para pendukung Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang menuntut kursi kekhalifahan bagi dirinya semakin bertambah. Melihat gelagat yang kurang baik ini, akhirnya Hasan bin Ali terpaksa menyerahkan kedudukannya kepada Mu'awiyah⁴⁷ atau kebijakan yang di tempuh oleh Nabi terhadap orang-orang musyrik tahun Hdaybiyah, sebagai alasan keharusan untuk berdamai dengan musuh, sangatlah tidak tepat, mereka tersebut diatas bedamai dengan musuh-musuhnya karena percaya bahwa justru dengan peperangan, panji kebenaran tidak akan berkkibar, kebatilan tidak akan lenyap dan cita-cita yang di idam-idamkan, yaitu tegaknya kebenaran dan sirnanya kebatilan akan terwujud.

⁴⁷ Shahihul Azis *dan lain-lain* Dalam *Prinsip-prinsip Islam* Yayasan Al-Bait, Beirut, 1986, Hal. 42-44

Ketegangan ini memuncak pada tanggal 10 Muharam 61, yaitu ketika Husein bin Ali dan sebagian kerabat Nabi Muhammad SAW dibantai di Padang Karbala, Irak. Peristiwa ini melahirkan aksi-aksi pemberontakan yang berkepanjangan di kalangan sebagian pengikut Syiah di kemudian hari, seperti pemberontakan Mukhtar as-Saqafi, pemberontakan Zaid bin Ali bin Husein, pemberontakan Yahya bin Zaid, dan pemberontakan Nafs az-Zakiyyah. Sejalan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan keadaan umat Islam lainnya, dalam Syiah pun berkembang berbagai pemikiran keislaman yang pada intinya berpusat pada tokoh-tokoh Ahlulbait (keluarga Nabi Muhammad SAW), seperti Ali bin Husein Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Zaid bin Ali, dan Ja'far as-Sadiq. Pemikiran yang paling menonjol terletak pada persoalan imamah atau kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hampir semua sekte Syiah menekankan arti penting kepemimpinan Ali bin Abi Talib. Yang membedakan Syiah dengan Sunni dalam permasalahan Imamah (kepemimpinan) pasca wafatnya Rasul yang berhak menduduki posisi sebagai pemimpin umat. Dalam Syiah juga terbaginya kedalam beberapa sekte-sekte, sebagaimana yang terjadi dalam Sunni. Namun semua sekte Syiah sepakat bahwa Imam pertama mereka adalah Imam Ali bin Abu Thalib kemudian Hasan bin Ali, dan Husein bin Ali. Namun setelah itu muncul perselisihan pendapat tentang pengganti

dari Imam Husein bin Ali . dalam hal ini muncul dua kubu, kelompok pertama yang meyakini bahwa Imamah di lanjutkan kepada Ali bin Husein Zainal Abidin, anak dari Imam Husein bin Ali. Kelompok kedua yang meyakini bahwa Imamah beralih kepada Muhammad bin Hanafiyah, putra Ali bin Abu Thalib dari Istri yang lainnya bukan Fatimah Az-Zahra. Akibat perbedaan antara kedua kelompok ini, muncullah berbagai sekte dalam Syiah. Sebagian di antara sekte-sekte ini sebetulnya tidak dapat disebut sebagai sekte atau aliran karena hanya merupakan pandangan seseorang atau sekelompok kecil saja. Para penulis klasik berselisih tajam mengenai jumlah sekte dalam Syiah. Akan tetapi, para ahli umumnya membagi sekte Syiah dalam empat golongan besar, yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah dan Ghulat (ekstrim).

2. Ahlusunnah Waljama'ah (Sunni)

Adalah golongan terbesar umat Islam yang menyandarkan amal ibadahnya kepada Mazhab yang empat yaitu : Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dalam perkembangan berikutnya muncul gerakan Salafiyah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan di teruskan oleh Muhammad Abdul Wahab dengan gerakan Wahabiyahnya, yang sekarang menjadi Mazhab resmi Kerajaan Arab Saudi. Di sebut dengan Ahlu Sunnah Waljama'ah adalah kelompok yang mengakui Khulafa al-Rasulidin : Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan dan

Ali bin Abu Thalib sebagai Khalifah yang sah setelah wafatnya Rasul.⁴⁸ Dan golongan yang menolak Khulafa ar-Rasyidin sebagai Khalifah yang sah setelah wafatnya Rasul di sebut Rafidah atau Syiah. Dan kalau kita amati secara cermat bahwa hampir semua Khalifah dari Abu Bakar sampai Bani Abasyiah ternyata mendukung Ahlu Sunnah dan sebaliknya membenci mereka yang mengikuti Ali dan membaiat kekhalifaannya. Berdasarkan ini semua Ali dan pengikutnya tidak di sebut sebagai Ali Sunnah. Sehingga timbullah dua keolompok pasca wafatnya Rasul hingga sekarang ini yaitu Sunni dan Syiah.⁴⁹ Kalau kita menganalisa perpecahan umat Islam pasca wafatnya Rasul, di mana keadaan menjadi stabil ketika Abu Bakar diangkat menjadi Khalifah oleh sebagian besar Sahabat. sedangkan Ali dan sebagian pengikutnya menolak pengangkatannya. dan yang aneh ketika penguasa-penguasa yang menguasai pemerintahan mengucilkan Ali dan pengikut-pengikutnya, dengan menuduhb mereka telah keluar dari Islam dan berusaha mengisolasi mereka dalam tatanan kehidupan dari segi Sosial, ekonomi dan politik. Ada tiga rangkain penting peristiwa yang menyebabkan perpecahan umat Islam⁵⁰

⁴⁸ Muhammad Tijani, Syiah : *Pembela Sunnah Nabi dan Kritik atas Paham Ahlu Sunnah*, di Terbitkan Sayyid al-Hasyimy, 2000, Hal.15

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 19.

1. Perpecahan awal umat Islam terjadi ketika Umar bin Khatab dan sebagian besar Sahabat menolak perintah Rasul untuk menuliskan wasiat bagi umatnya supaya terhindar dari kesesatan.⁵¹ Sebenarnya mereka bukan hanya menolak perintah itu saja bahkan lebih dari itu mereka menuduh Rasul pada waktu itu sakit berbicara tidak karuan dan banyak mengigau seraya menyerukan cukuplah Al-Qur'an saja sebagai pegangan umat.

Dari kejadian ini Ibnu Abbas menamakannya sebagai Tragedi umat Islam, hal ini jelas bahwa para Sahabat menolak Sunnah Rasul dan mengatakan cukuplah Al-Qur'an saja yang menjadi pegangan kita. Adapun Imam Ali dan pengikutnya yang sebagian kecil Sahabat melaksanakan perintah Rasul tanpa menolak ataupun membantahnya. Sebagaimana dalam Al-Quran " Hai orang-orang beriman taatilah Allah dan Rasulnya." (An-Nisa 59)

2. Peristiwa ketika para Sahabat menolak untuk bergabung dengan pasukan yang di pimpin oleh Usamah bin Zaid dua hari sebelum wafatnya Rasul. Mereka mengkritik kebijakan yang di keluarkan oleh Rasul yang telah mengangkat seorang anak muda yang baru berusia 17 tahun untuk memimpin pasukan yang demikian besar. Abu Bakar dan Umar dan beberapa Sahabat lainnya di kenal sebagai orang-orang yang tidak mau bergabung dengan pasukan Usamah. Adapun Ali dan pengikutnya di perintahkan Rasul untuk tidak bergabung dalam pasukan Usamah demi mencegah

⁵¹ Tragedi Hari Kematian Rasulullah SAW

perselisihan serta untuk mengendalikan urusan yang telah di tentukan Allah dan Rasulnya. orang-orang Qurais yang licik memahami maksud larangan tersebut sehingga mereka sengaja melambatkan diri untuk bergabung dengan pasukan Usamah. mereka memutuskan untuk tidak bergabung dengan pasukan Usamah dan menunggu detik-detik wafatnya Rasul. Dengan kata lain mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdul Rahman bin Auf dan Abu Ubaidilah al-Jarroh menolak Sunnah Rasul dan berijtihad dengan pikirannya sendiri demi untuk mendapatkan jabatan kekhilafaan walaupun melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita melihat bagaimana Imam Ali pada saat itu tetap menjaga wasiat Rasul untuk memandikan, mengkafani, menshalatkan dan mengebumikan di saat para Sahabat berlomba-lomba untuk memilih pengganti Rasul di Saqifah.

3. Peristiwa Saqifah di mana mayoritas Sahabat dari Muhajirin dan Anshar sepakat untuk meninggalkan wasiat Rasul yang menunjuk Ali sebagaimana Rasul wasiatkan di Ghadir Khum sepulang Haji Wada'. Walaupun untuk itu mereka harus membohongi diri mereka sendiri. Bukan hanya itu saja mereka bersiap-siap untuk membunuh siapa saja termasuk orang terdekat Nabi yang tidak setuju dengan penobatan Abu Bakar sebagai Khalifah.⁵²

⁵² Dalam sejarah Islam, peristiwa Saqifah adalah momen yang sangat penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awwal 40 H. di Saqifah Bani Sa'ad, Madinah. Peristiwa ini adalah pertemuan antara para sahabat yang berdebat tentang siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Akhirnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq terpilih sebagai Khalifah pertama.

Pada saat yang sama Ali dan sebagian kecil Sahabatnya tetap menolak kekhalifahan Abu Bakar dan berpegang teguh pada wasiat Rasul sebelumnya. Adanya tiga skenario jahat untuk menghancurkan Ali dan pengikutnya.

1. Embargo ekonomi

Skenario pertama ini yang di tempuh para penguasa waktu itu adalah penghancuran sumber-sumber ekonomi dan keuangan pihak oposisi. Abu Bakar dan Umar telah merampas hak tanah Fadak dari Fatimah dan menganggapnya sebagai tanah orang-orang Islam dengan argumen yang mereka lontarkan bahwa tanah itu bukan hanya milik Fatimah saja sebagaimana yang Rasul siapkan untuk anaknya itu . karena para Nabi tidak mewarisi kata Umar.⁵³ Abu Bakar dan Umar telah mengharamkan Khumus untuk keluarga Nabi padahal Nabi jelas-jelas membolehkannya karena keluarga Nabi di Haramkan menerima Shadaqah.

2. Isolasi Sosial

Langkah pertama Abu Bakar dan Umar adalah penghancuran atas keturunan Rasul yang suci. Keutamaan yang di miliki oleh Ali dan Fatimah yang ternyata telah menimbulkan rasa dengki bukan hanya dari Sahabat-sahaabat saja tapi juga dari orang-orang Munafik yang selalu berusaha untuk menjatuhkan nama baik Ali dan Fatimah serta keluarganya. Yang di lakukan Abu Bakar dan Umar

⁵³ Kisah tanah Fadak terkenal dalam buku-buku Sejarah termasuk dalam Bukhari dan Muslim

untuk menghancurkan keluarga Rasulullah dengan cara menghilangkan penghargaan dan penghormatan manusia kepada mereka. Sebagaimana dilakukan Umar terhadap Fatimah dengan cara membawa kayu bakar dan api untuk membakar rumah Fatimah jika tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar.

3. Isolasi Politik

Isolasi politik dilakukan dengan cara melarang Ali untuk berpartisipasi aktif dalam semua aspek pemerintahan dan politik saat itu. Tidak heran karenanya kalau kemudian selama lebih dari seperempat abad di mulai dari pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ali menjauhkan diri dari kancah politik praktis saat itu. Dari paparan diatas tadi bukan merupakan suatu rekayasa akan tetapi benar-benar di catat dalam Sejarah Islam. Tidak heran jika Sejarahwan pernah menghitung sebanyak 70 kali Umar bin al-Khattab mengucapkan pengakuan keluasaan ilmu Ali. Kalau tidak ada Ali maka celakalah Umar. Sementara Abu Bakar sendiri pernah mengucapkannya : Hidup Saya tidak akan ada artinya tanpa Ali bin Abu Thalib.⁵⁴

1. Prinsip-prinsip Pemerintahan Islam menurut Imam Khomeini

a. Melaksanakan Hukum Islam

Pemerintahan Islam adalah Pemerintahan Konstitusional, yang di maksud Konstitusional adalah yang memiliki pada Hukum yang di

sesuaikan dengan pendapat mayoritas. Dalam Pemerintahan Islam Hukum sudah ada yaitu Hukum Tuhan, dengan kata lain Tuhanlah pemegang kekuasaan Legislatif, disamping sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang sebenarnya bukan Parlemen di dalam system Pemerintahan Islam, jika kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif berada pada para Faqih (Ulama), maka kekuasaan Legislatif merupakan hak Prerogatif Tuhan, akan tetapi bukan berarti Lembaga Legislatif tidak di perlukan, Lembaga Legislatif tetap di perlukan walaupun dalam pemerintahan Islam.

b. Membangun tatanan yang adil

Prinsip-prinsip keadilan seperti ketidak berpihakan atau kejujuran atau persamaan atau ketidaksamaan peserta, tidak terbatas keadilan pada Hukum. Pada kenyataannya keadilan harus di pandang, sebagai mana di indikasikan oleh para Filosof, sebagai karakteristik bagi semua penilaian moral. Konstitusi suci Islam sanagat menkankan keadilan sebagai salah satu aspek yang sangat penting, di sebabkan keterlibatannya yang mendalam dengan nilai-nilai moral keyakinan ideologis. Konsep keadilan yang luas yang di sajikan dan di bahas dalam Konstitusi suci Islam merupakan suatu topik yang sangat luas, bagaimana keadilan secara relevan di kaitkan dengan keyakinan pribadi terhadap Tuhan. Kendati demikian Konstitusi suci Islam telah banyak membahas keadilan dalam berbagai peristiwa atau lukisan yang di ceritakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

c. Menentang segala bentuk agresi dan mempertahankan integritas teritorial tanah Islam

Di dalam Islam di kenal istilah Jihad yang di ambil dari bahasa Arab yaitu dari kata kerja Jahada yang mempunyai arti berusaha keras. Di dalam Konstitusi suci Islam membatasi kerja keras orang-orang Islam sendiri di jalan Tuhan dalam tiga wilayah besar yaitu membela Bangsa Islam dari serangan dari luar, membebaskan orang dari segala jenis kekuasaan yang menindas dan menyeru manusia kepada Islam dan menunjuka pesan-pesan Islam kepada semua orang dalam pengertian sebagai ajakan dan pertimbangan. Tentu saja, kerja keras orang-orang Islam itu sendiri di tuntutan di semua jenis kegiatan dalam kehidupan mereka dan harus di laksanakan secara sempurna dan dengan cara Ikhlas, khususnya dalam pelayanan-pelayanan Ilahiyah. Akan tetapi, Jihad selalu di tekan dalam ketiga aspek di atas yang di atur oleh Konstitusi suci Islam.

2. Sistem Pemerintahan Islam menurut Imam Khomeini

a. Landasan Pemikiran Imam Khomeini

Yang menjadikan landasan pemikiran Imam Khomeini terkait dengan suatu keyakinannya terhadap Agama Islam Mazhab Syiah yang mempercayai bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan harus di lanjutkan oleh penggantinya, yang telah di rekomendasikan oleh Nabi SAW sebelum beliau wafat pada saat setelah di laksanakannya *Haji Wada'* (*Haji perpisahan*) yang mana mengangkat

dan memproklamirkan Imam Ali bin Abu Thalib sebagai pengganti beliau. Namun dalam prakteknya setelah Nabi SAW wafat, umat muslim terpecah belah tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin setelah Nabi, munculnya dua kelompok yang bersebelahan paham antara kelompok Syiah yang mendukung pencalonan Ali bin Abu Thalib dan kelompok Sunni yang mendukung pencalonan Abu Bakar As-Shidiq. Hal ini sangat menarik untuk di kaji lebih dalam tentang sistem pemerintahan Islam menurut beberapa pandangan para Ulama baik Sunni maupun Syiah.

b. Bentuk Pemerintahan Islam

Adanya berbagai macam persepsi berkaitan dengan bentuk pemerintahan Islam itu sendiri, adanya konsep Wilayat Al Faqih (pemerintahan para Ulama) yang di kembangkan oleh kalangan Ulama Syiah, seperti Imam Khomeini, Jawad Mugnyah, Muhammad Bagir Shadr dan Kazim Hairi. Sedangkan dari pemikiran politik Sunni bahwa pemerintahan adalah sesuatu yang niscaya demi memungkinkan manusia bekerja sama untuk meraih tujuan hidupnya yang sejati. Yakni suatu kehidupan yang baik berdasarkan Syariah yang pada gilirannya akan menghasilkan bagi mereka tempat yang baik di kehidupan Akhirat.

Timbulnya perdebatan tentang penegakan pemerintahan apakah merupakan suatu kewajiban keagamaan ataukah kebutuhan yang bersifat rasional. Kelompok seperti Mu'tazilah dan Khawarij mempunyai alasan yang berbeda pendapat bahwa hal ini merupakan suatu kewajiban

keagamaan, sementara para pemikir politik Sunni yang lebih ortodok seperti: Al-Farabi Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyyah dan sebagainya berpendapat bahwa hal ini bukan merupakan kewajiban keagamaan, melainkan suatu kebutuhan yang bersifat rasional belaka. Hal ini penting, mengingat ini akan menentukan cara pandangnya akan sifat sacral kepemimpinan dengan cara pengelolaan suatu Negara atau Pemerintahan dalam teori politik dan kenegaraan yang di kembangkan oleh para pemikir politik Sunni, seperti Abu Yusuf, Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghazali, Fakhr Al-Dn Al-Razi, Al-Bagdadi. Seluruh otoritas atau kekuasaan di pusatkan pada person Imam sebagai pemimpin kaum muslim, dan tidak ada otoritas atau kekuatan dianggap sah kecuali di laksanakan sebagai hasil delegasi darinya, baik langsung maupun tidak langsung.

c. Konsep Pemimpin

Sesungguhnya Hukum-hukum Allah baik hukum yang berkaitan dengan kekayaan politik maupun hak-hak tidak di hapuskan, akan tetapi tetap berlaku samapai hari kiamat. Kekalnya hukum-hukum itu memerlukan pemerintahan dan kepemimpinan yang menjamin terpeliharanya undang-undang Ilahi dan pelaksanaannya , karena memelihara sistem termasuk kewajiban yang penting dan masuk

F. Definisi Konsepsional

Konsep merupakan unsur penelitian yang penting dan merupakan penelitian yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak fenomena sosial, dan konsep ini diperoleh dengan melakukan Generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang sama (Sofyan Efendi, 1985). Agar tidak terjadi salah penafsiran antar konsep yang satu dengan yang lainnya, maka akan di batasi masing-masing konsep :

1. Pemerintahan

Pengaturan dan pengurusan Negara pada umumnya dan rakyat serta wilayah pada khususnya. Pemerintahan adalah merupakan suatu sistem untuk fungsi penagturan tersebut, pemerintahan¹ memerlukan aktor atau pelaku untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang di sebut pemerintah

2. Sistem Pemerintahan

Suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang saling terkait satu sama lainnya yang mempunyai legalitas untuk menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintahan.

3. Sistem Pemerintahan Islam

Suatu aturan yang di buat berdasarkan hukum-hukum Islam yang mana hukum tersebut tercatat dalam Kitab suci umat Islam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai petunjuk bagi umat manusia, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.

G. Batasan Permasalahan

Agar supaya tidak keluar dari penelitian, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan yang akan diteliti

Unsur-unsur Sistem Pemerintahan Islam . Sebagaimana dalam pandangan Pemikiran politik Sunni Sistem Pemerintahan Islam ditegakan diatas empat Unsur-unsur yaitu :⁵⁵

1. Kedaulatan ditangan Syara

Kedaulatan ditangan syara. Yaitu berasal dari kata as-Siyadah atau kedaulatan, kedaulatan di tangan syara bukan di tangan umat. Hal ini dapat di buktikan bahwa kata as-Siyadah atau kedaulatan itu sebenarnya istilah dari Barat. Sedangkan yang di maksud dengan kata as-Siyadah tersebut adalah mempunyai arti menangani (mumaris) dan menjalankan (musayyir), suatu kehendak atau aspirasi (iradah) tertentu.

2. Kekuasaan di tangan Umat

Dalam peraturan Islam pengangkatan Khalifah atau pemimpin di lakukan oleh umat dan seorang Khalifah hanya memiliki kekuasaan melalui baiat..

3. Mengangkat satu Khalifah hukumnya Fardu bagi seluruh kaum muslim

Kewajiban tersebut sudah di tetapkan di dalam Hadis.Hal ini merupakan sangat penting dalam umat Islam, agar supaya umat tidak dapat terpecah belah.

4. Hanya Khalifah yang berhak melakukan Tabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum Syara

Hal ini berdasarkan Ijma (mufakat) Sahabat. Ijma Sahabat telah menetapkan, bahwa hanya Khalifah yang berhak untuk mengadopsi hukum-hukum Syara, sebagaimana di ambil dari Kaidah Ushul Fiqih : " Perintaha Imam (Khalifah) menghilangkan Perselisihan (di kalangan Fuqaha)

H. Definisi Operasional

Adalah mengoperasionalkan definisi konsep guna mempermudah di dalam melakukan kegiatan penelitian. Menurut Masri Singarimbun definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel itu bisa diukur. Adapun variabel-variabel yang bisa diukur tersebut adalah :

1. Prinsip-prinsip dalam Pemerintahan Islam menurut Imam Khomeini
 - a. mempertahankan hukum Islam
 - b. Membangun tatanan yang adil
 - c. Menentang segala bentuk agresi dan mempertahankan integritas teritorial tanah Islam
2. Sistem Pemerintahan Islam menurut Imam Khomeini
 - a. Landasan Pemikiran
 - b. Bentuk Pemerintahan Islam
 - c. Konsep Pemimpin

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang di gunakan dalam penelitian suatu masalah dengan maksud memperoleh suatu perumusan hasil, metode yang akan peneliti gunakan untuk meneliti harus sesuai dengan sifat data yang di peroleh. Metode Penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian dengan taraf pengetahuan ilmiah yang menyimpulkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah.

1. Jenis Penelitian

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu : menggambarkan atau melukiskan fenomena yang ada

2. Data dan Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka penulis menggunakan analisa Kualitatif, yaitu data data yang sudah terkumpul, diperoleh kemudian diklarifikasikan berdasarkan jenis data dan kemudian disusun secara logis dan untuk menjawab permasalahan. oleh karena metode penelitian digunakan adalah deskriptif atau analisa data bersifat kualitatif, maka dibutuhkan data penelitian primer dan sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang di kumpulkan dari sumbernya yang berkaitan dengan proposal penelitian, yang bersumber pada karya-karya Imam Khomeini itu sendiri seperti : Hukumat al-Islami dan Kasyf al-Asrar.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer, yang di peroleh dari sumber selain Imam Khomeini, seperti : Riza Sihbudi Dinamika Revolusi Islam Iran, Edward Mortimer Islam dan kekuasaan. Sayyid Husein M. Jafri Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syiah dari Saqifah sampai Imamah dan tokoh-tokoh lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat data-data yang sudah ada pada penelitian Menurut Winarno Surachman, teknik dokumentasi sebagai berikut :⁵⁶

⁵⁶ Winarno Surachman, *Metodologi Penelitian Sosial dalam Perspektif DBPS*, Yogyakarta, 1979, Hal 45

“Laporan tertulis dari peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan “.

Dalam hal ini penulis mempelajari dan mengungkapkan bahan-bahan tertulis berupa arsip-arsip, surat-surat, catatan pribadi, pendapat-pendapat dan dokumen lain yang sekiranya mempunyai hubungan dan dapat mendukungnya.

b. Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka untuk mengadakan Tanya jawab dengan PP. Ijabi yang di wakili oleh Ust. Miftah Fauzi Rahmat, sebagai pengurus dalam bidang da'wah, untuk melengkapi dalam pembuatan Skripsi.

4. Teknik Analisis Data

Noeng Mujahir dalam bukunya “ Metode Penelitian Kualitatif “ menyatakan bahwa :⁵⁷

“ Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil, observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang di teliti dan menyajikan sebagai lawan bagi orang lain.

Analisa data Kualitatif Menurut Koentjoroningrat adalah :⁵⁸

“Analisa data Kualitatif merupakan data yang dikumpulkan hanya sedikit yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak disusun dalam suatu struktur kalsifikator”.

⁵⁷ Skripsi Dina Mardiana I, *Peran Sektor Transportasi Kota dalam Penerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal di Daerah Yogyakarta*, Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UMY, 2001, hal.27.

⁵⁸ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1991, Hal.42